

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat.

Prinsip Konvensional yang digunakan Bank Konvensional menggunakan dua metode, yaitu :*pertama* Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu. *Kedua* untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut *fee based* (Martono, 2002 : 20). Pada bank konvensional kepentingan pemilik dana (deposan) adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedang kepentingan pemegang saham adalah diantaranya

memperoleh *spread* yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman (mengoptimalkan *interest difference*). Di lain pihak kepentingan pemakai dana (debitor) adalah memperoleh tingkat bunga yang rendah (biaya murah). Dengan demikian terhadap ketiga kepentingan dari tiga pihak tersebut terjadi antagonisme yang sulit diharmoniskan. Dalam hal ini bank konvensional berfungsi sebagai lembaga perantara saja. Dan tidak adanya ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, Pengelola bank dan nasabah karena masing-masing pihak mempunyai keinginan yang bertolak belakang.

Menurut Keppres No. 38 tahun 1988 yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah jenis bank yang tercantum dalam ayat (1) pasal 4 UU. No. 14 tahun 1967 yang meliputi bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai dan bank lainnya. Status hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pertama kali diakui dalam pakto tanggal 27 Oktober 1988, sebagai bagian dari paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan. Secara historis, BPR adalah penjelmaan dari beberapa lembaga keuangan, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Desa (BKPD) dan atau lembaga lainnya yang dapat disamakan dengan itu. Sejak dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang

pokok perbankan, keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut status hukumnya diperjelas melalui ijin dari menteri keuangan.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung perkembangan usaha yang bersifat dinamis, diperlukan perbankan nasional yang tangguh, termasuk industri bank perkreditan rakyat yang sehat, kuat, produktif dan memiliki daya saing agar mampu melayani masyarakat, terutama pengusaha mikro dan kecil. Sejalan dengan visi perbankan nasional untuk mencapai sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan maka kelembagaan industri bank perkreditan rakyat perlu diperkuat, antara lain pada aspek permodalan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan fungsi intermediasi bank perkreditan rakyat melalui perluasan jaringan kantor, ketentuan pembukaan kantor cabang perlu direlaksasi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian berupa kemampuan permodalan dan aspek kelayakan usaha (*feasibility study*).

Bank perkreditan rakyat yang telah lama tumbuh di bandingkan dengan bank pembiayaan rakyat syariah jelas memiliki jumlah kantor yang lebih banyak dibandingkan dengan BPRS. Seperti yang terlihat dalam tabel 1.1 mengenai perkembangan jumlah BPR di Indonesia.

Tabel : 1.1

## Perkembangan Jumlah BPR Konvensional

Jenis Bank	Tahun		
	2010	2011	2012
K.P.BPR	1706	1669	1653
K.C.BPR	1088	1211	1329

Sumber: BI Statistik Perbankan Konvensional

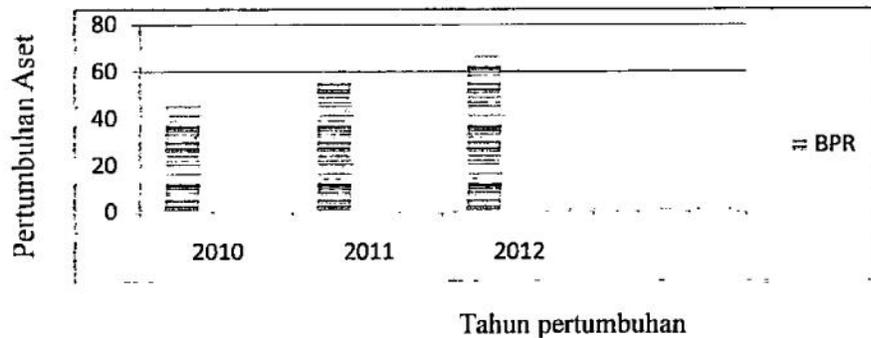
Pada tabel 1.1 menunjukkan bank perkreditan rakyat konvensional yang dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, akan tetapi pada jumlah kantor cabang bank perkreditan rakyat terus mengalami peningkatan hanya saja tidak signifikan. dan hal ini merupakan suatu peningkatan BPR konvensional di Indonesia yang didorong oleh tingginya kebutuhan masyarakat untuk bertansaksi melalui perbankan, dan hal ini juga dikarenakan masih kurangnya BPR Syariah di Indonesia. Semakin berkembangnya BPR secara langsung berpengaruh pada perkembangan asetnya, pada tabel 1.2 jumlah aset BPR ditahun 2012 mengalami peningkatan hanya saja peningkatan tersebut tidak signifikan. Untuk lebih terlihat peningkatan pada jumlah aset Bank Perkreditan Rakyat (Gambar 1.1).

Tabel : 1.2

## Jumlah Aset BPR Konvensional

Jenis Bank	Tahun		
	2010	2011	2012
BPR	45.742.317.543	55.799.288.624	67.396.513.781

Sumber : Statistik Perbankan Konvensional



Sumber : Statistik Perbankan data telah diolah

Gambar 1.1 Grafik Peningkatan Aset Bank Perkreditan Rakyat

Pada tabel 1.2 jumlah aset Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2010 hingga 2012 mengalami peningkatan yang tidak signifikan. Terlihat pada gambar 1.1 perkembangan aset Bank Perkreditan Rakyat mengalami perkembangan yang baik.

Karakteristik dasar dari bank pembiayaan rakyat syariah yang antara lain melarang penerapan riba dan melarang transaksi yang didasarkan pada *motif spekulasi*, membuat bank pembiayaan rakyat syariah diidentikan sebagai lembaga pembiayaan yang memiliki keterkaitan erat dengan usaha mikro kecil dan hal inilah yang menjadi keunggulan kompetitif bagi bank pembiayaan rakyat syariah. Operasional bank pembiayaan rakyat syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil ini ternyata menjadi solusi terhadap wabah penyakit *negative spread* yang dialami oleh kebanyakan bank perkreditan rakyat konvensional. Sebagai salah satu lembaga keuangan, BPRS maupun BPR perlu menjaga

kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal. Terlebih lagi BPR Syariah harus bersaing dengan BPR Konvensional yang dominan dan telah berkembang pesat di Indonesia.

Bank sebagai lembaga perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat, di harapkan dengan dana di maksud dapat memenuhi kebutuhan dana perkreditan yang tidak di sediakan oleh dua lembaga sebelumnya (Swasta dan Negara). Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah lama mendambakan kehadiran system lembaga keuangan yang sesuai tuntutan kebutuhan tidak sebatas financial namun juga tuntutan moralitasnya. Sistem bank mana yang di maksud adalah perbankan yang terbebas dari praktik bunga (*free interest banking*). Sistem bank bebas bunga atau disebut pula bank Islam atau bank syariah, memang tidak khusus di peruntukkan untuk sekelompok orang, namun sesuai landasan Islam yang "*Rahmatan lil 'alamin*", didirikan guna melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang di anut.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 yang dimaksud dengan bank perkreditan rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah yang selanjutnya disebut BPRS adalah bank

pembiayaan rakyat syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah agar dapat melayani masyarakat yang lebih luas, maka diperlukan penyesuaian kebijakan yang berkaitan dengan perluasan jaringan kantor dan permodalan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selain membutuhkan permodalan yang kuat juga membutuhkan pengelolaan yang profesional. Dalam kurun waktu tiga tahun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah telah mengalami pertumbuhan secara baik walaupun tidak signifikan, dari segi aset maupun jumlah BPRS. Hal ini dapat dilihat dalam tabel 1.3 dan 1.4 yang menggambarkan perkembangan BPRS dan jumlah aset dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.

**Tabel : 1.3**

**Perkembangan Jumlah BPR Syariah**

Jenis Bank	Tahun		
	2010	2011	2012
BPRS	150	155	156
K.BPRS	286	364	401

Sumber: BI Statistik Perbankan Syariah

Pada tabel 1.3 perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang tidak signifikan dan hal ini merupakan suatu peningkatan ekstensi BPR syariah di Indonesia yang didorong oleh tingginya minat masyarakat untuk menempatkan dananya di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Adapun jumlah aset BPRS dari tahun 2010 sampai dengan 2012 terus menunjukkan peningkatan, hal ini dapat kita lihat dalam tabel 1.4 yang menggambarkan jumlah aset BPRS.

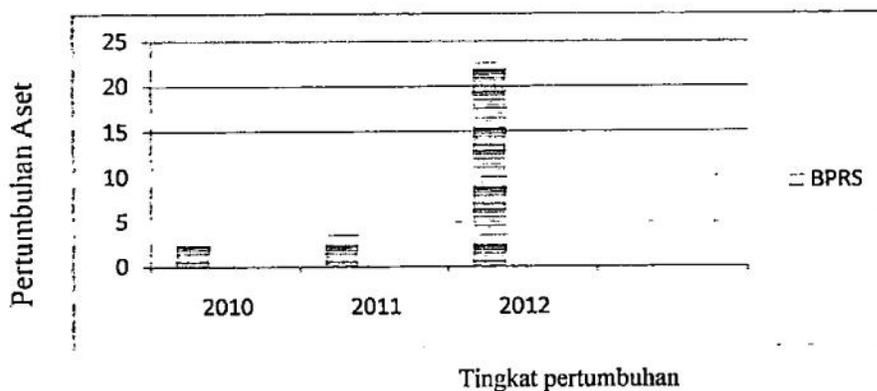
**Tabel : 1.4**  
**Jumlah aset BPR Syariah (Milyar Rupiah)**

Jenis Bank	Tahun		
	2010	2011	2012
<b>BPRS</b>	2.361.65	4.295.09	22.664.34

Sumber: BI Statistik Perbankan Syariah

Dilihat dari tabel 1.4 perkembangan aset BPR Syariah dari tahun 2010 samapi dengan tahun 2012 mengalami peningkatan setiap tahunnya, peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2012. Semakin tinggi jumlah aset BPRS maka akan mendorong kemajuan pertumbuhan BPRS itu sendiri. Dan untuk lebih terlihat peningkatan jumlah aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Garfik 1.2).

**Grafik 1.2. Peningkatan Aset BPRS**



Sumber : Statistik Perbankan data telah diolah

**Gambar 1.2 Grafik Peningkatan Aset Bank Perkreditan Rakyat**

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007 perihal Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Adapun penilaian tingkat kesehatan BPRS mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:

- a. permodalan (*capital*)
- b. kualitas aset (*asset quality*)
- c. rentabilitas (*earning*)
- d. likuiditas (*liquidity*)
- e. manajemen (*management*)

Sebagai salah satu lembaga keuangan BPRS dan BPR perlu menjaga kinerjanya agar dapat beroperasi secara optimal, terlebih lagi BPR syariah harus besaing dengan BPR konvensional yang dominan telah lebih dulu berkembang pesat di Indonesia. Persaingan yang semakin tajam ini harus dibarengi dengan manajemen yang baik untuk bisa bertahan hidup di industri perbankan, salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh BPRS maupun BPR untuk bisa bertahan hidup adalah kinerja (kondisi keuangan). Penilaian kinerja keuangan suatu bank dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan yang telah di publikasikan oleh Bank Indonesia. *Pertama* yaitu dengan menganalisis tingkat permodalan (*capital*) BPRS maupun BPR dengan menggunakan analisis rasio yaitu rasio CAR, *kedua* menganalisis kualitas asetnya (*asset quality*) dengan menggunakan rasio analisis NPF, *ketiga* menganalisis tingkat rentabilitas

(*earning*) keuangan bank dengan menggunakan analisis ROE, *keempat* menganalisis tingkat likuiditas (*liquidity*) bank dengan menggunakan rasio FDR dan *terakhir* menganalisis tingkat kesehatan bank dengan melihat dari kinerja manajemen (*management*) dengan menggunakan analisis rasio ROA.

Melihat dari beberapa penelitian terdahulu seperti, dalam penelitian Litta Rachmalia (2013) yang berjudul "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan antara BPR Konvensional dan BPR Syariah" dalam penelitiannya Litta Rachmalia (2013) hanya menggunakan analisis ROA dalam mengukur kinerja BPR dan BPRS. dan penulis melihat dari beberapa tabel BPRS dan BPR diatas yang menggambarkan perkembangan jumlah lembaga, dan jumlah aset BPRS dan BPR dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terus mengalami, pada tahun 2010 jumlah aset BPRS meningkat secara signifikan. Melihat hal ini penulis tertarik untuk menganalisis kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pada periode 2010 sampai dengan 2012 dengan menggunakan analisis CAEL.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya. Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan Statistik Perbankan yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia, dan masa pengamatan penelitian ini 3 (Tiga) tahun pengamatan yaitu dari tahun 2010-2012.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perkembangan kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selama periode 2010-2012 dilihat dari rasio CAEL?
2. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah selama periode 2010-2012 yang diukur dengan analisis CAEL?